

## PENINGKATAN MUTU LEMBAGA PAUD MELALUI PENDAMPINGAN TERSTRUKTUR DALAM PERSIAPAN AKREDITASI DI KECAMATAN SIKUR, LOMBOK TIMUR

Mohzana<sup>1)\*</sup>, Muh. Jaelani Al Pansori<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Hamzanwadi

\*Corresponding Author: mohzana@hamzanwadi.ac.id

### Article Info

#### Article History:

Received June 10, 2025

Revised June 25, 2025

Accepted June 30, 2025

#### Keywords:

PAUD,  
akreditasi,  
pendampingan,  
putu lembaga,

### ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam menghadapi proses akreditasi melalui pendampingan terstruktur. Berdasarkan pemetaan awal terhadap 76 lembaga PAUD di Kecamatan Sikur, Lombok Timur, ditemukan bahwa sebagian besar lembaga belum memahami secara komprehensif instrumen akreditasi dan belum memiliki kelengkapan dokumen kelembagaan sesuai dengan Standar Nasional PAUD. Kegiatan ini melibatkan delapan lembaga mitra dan dilaksanakan melalui tiga tahapan utama: pelatihan pemahaman standar akreditasi, asistensi penyusunan dokumen kelembagaan, dan simulasi pengisian instrumen digital (Sispena 3.1). Metode yang digunakan bersifat partisipatif dan berbasis kebutuhan lapangan, dengan pendekatan praktik langsung dan pendampingan intensif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kapasitas manajerial lembaga, keterampilan digital pengelola, serta terbentuknya jejaring kolaboratif antar-PAUD di tingkat kecamatan. Pendampingan ini tidak hanya menghasilkan dokumen akreditasi yang sesuai standar, tetapi juga mendorong transformasi kelembagaan berbasis mutu dan membangun budaya reflektif dalam tata kelola pendidikan. Implikasi dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual dan kolaboratif efektif dalam menjembatani kesenjangan mutu PAUD di daerah.

### ABSTRACT

*This Community Service (PkM) activity aims to enhance the readiness of Early Childhood Education (PAUD) institutions to undergo the accreditation process through structured assistance. Based on the initial mapping of 76 PAUD institutions in Sikur District, East Lombok, it was found that most institutions lacked a comprehensive understanding of the accreditation instruments and had yet to complete the required institutional documents by the National Standards for PAUD. This activity involved eight partner institutions and was carried out through three main stages: training on accreditation standards, assistance in preparing institutional documents, and simulation of filling out the digital instrument (Sispena 3.1). The method employed was participatory and field-based, with a hands-on approach and intensive mentoring. The results of the activity showed a significant improvement in institutional managerial capacity, digital skills of administrators, and the establishment of collaborative networks among PAUD institutions at the sub-district level. This mentoring program not only resulted in accreditation documents that meet the standards but also encouraged quality-based institutional transformation and fostered a reflective culture in educational governance. The implications of this activity indicate that a contextual and collaborative approach is effective in bridging the quality gap of PAUD institutions in the region.*

Copyright © 2025, The Author(s).  
This is an open access article  
under the CC-BY-SA license



**How to cite:** Mohzana, M., & Al Pansori, M. J. (2025). PENINGKATAN MUTU LEMBAGA PAUD MELALUI PENDAMPINGAN TERSTRUKTUR DALAM PERSIAPAN AKREDITASI DI KECAMATAN SIKUR, LOMBOK TIMUR. *Devote : Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 4(2), 183–190. <https://doi.org/10.55681/devote.v4i2.4115>

## PENDAHULUAN

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan tahap awal dan fundamental dalam sistem pendidikan nasional yang memberikan dasar penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Tahapan ini tidak hanya menyiapkan anak memasuki pendidikan formal, tetapi juga menanamkan nilai-nilai dasar sosial, emosional, moral, dan kognitif sejak usia dini. Oleh karena itu, kualitas layanan PAUD memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia suatu bangsa (UNESCO, 2015).

Mutu lembaga PAUD ditentukan oleh beragam faktor, mulai dari kompetensi tenaga pendidik, kurikulum yang digunakan, manajemen kelembagaan, hingga dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Setiap lembaga PAUD diharapkan mampu memenuhi Standar Nasional PAUD sebagai indikator penyelenggaraan layanan pendidikan yang layak dan bermutu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan akreditasi sebagai mekanisme formal untuk menjamin dan meningkatkan mutu layanan PAUD di seluruh wilayah Indonesia (BAN PAUD dan PNF, 2020).

Akreditasi bukan hanya proses administratif, melainkan juga bentuk evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lembaga pendidikan. Dalam praktiknya, akreditasi mendorong lembaga untuk membenahi kelemahan yang ada dan menetapkan strategi peningkatan mutu secara berkelanjutan. Penilaian dalam akreditasi mencakup delapan komponen standar, antara lain standar tingkat pencapaian perkembangan anak, pendidik dan tenaga kependidikan, isi, proses, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta penilaian pendidikan (Kemdikbud, 2020).

Kecamatan Sikur, sebagai salah satu wilayah administratif di Kabupaten Lombok Timur, tercatat memiliki 76 satuan pendidikan PAUD aktif berdasarkan data Kemendikdasmen per 17 Juni 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 27 merupakan Kelompok Bermain (KB) dan 49 merupakan Taman Kanak-Kanak (TK) atau bentuk lain yang sederajat. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan peningkatan mutu dan penjaminan kualitas pendidikan di wilayah ini cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang berkelanjutan.

Sebagian besar lembaga PAUD di Kecamatan Sikur masih menghadapi berbagai kendala dalam proses persiapan akreditasi. Permasalahan umum yang dijumpai antara lain adalah rendahnya pemahaman terhadap perangkat akreditasi, belum tersusunnya dokumen administrasi yang sesuai standar, kurangnya pendampingan teknis dari pengawas, serta keterbatasan akses pelatihan akreditasi bagi guru dan pengelola. Hal ini berdampak pada lemahnya kesiapan lembaga dalam mengikuti proses akreditasi secara optimal.

Selain itu, banyak lembaga belum memiliki dokumen penting seperti Rencana Kerja Tahunan (RKT), laporan evaluasi diri, serta dokumen pembelajaran yang tersusun sistematis. Penggunaan instrumen penilaian perkembangan anak pun masih belum merata di antara pendidik, sehingga capaian pembelajaran anak sulit untuk diukur secara akurat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan standar nasional dengan kapasitas aktual lembaga PAUD di lapangan (Suyadi & Ulfatin, 2017).

Di sisi lain, pengelola lembaga juga menyatakan kebingungan dalam memahami sistem penilaian akreditasi daring yang digunakan BAN PAUD dan PNF. Ketidakterbatasan akses terhadap internet, rendahnya literasi digital pendidik, serta kurangnya bimbingan dari pihak terkait menjadi faktor yang memperparah keadaan. Padahal, proses akreditasi saat ini menuntut kesiapan teknologi informasi dan ketelitian dalam mengisi data berbasis sistem (BAN PAUD dan PNF, 2020).

Pendampingan teknis yang terstruktur menjadi kebutuhan utama dalam mengatasi permasalahan tersebut. Melalui kegiatan pendampingan, lembaga PAUD dapat dibantu dalam memahami isi instrumen akreditasi, menyusun dokumen yang diperlukan, serta mempraktikkan tata kelola lembaga berbasis mutu. Pendampingan juga menjadi media bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia lembaga secara langsung dan aplikatif, yang tidak hanya berguna untuk akreditasi tetapi juga keberlangsungan layanan pendidikan (UNESCO, 2015).

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini merupakan bentuk kontribusi nyata sivitas akademika dalam menjawab permasalahan di lingkungan sekitar, khususnya dalam bidang pendidikan anak usia dini. Melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif, tim pelaksana PkM melakukan pendampingan terstruktur kepada sejumlah lembaga PAUD di Kecamatan Sikur untuk meningkatkan kesiapan mereka dalam mengikuti proses akreditasi. Bentuk pendampingan meliputi pelatihan penyusunan dokumen, asistensi manajemen mutu, serta simulasi pengisian instrumen akreditasi berbasis digital.

Pelaksanaan PkM ini tidak hanya bertujuan membantu lembaga memperoleh status akreditasi, tetapi juga mendorong terciptanya budaya mutu dan tata kelola yang berkelanjutan. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi model penguatan lembaga PAUD berbasis masyarakat yang dapat direplikasi di daerah lain, sekaligus memperluas peran perguruan tinggi dalam memberdayakan pendidikan dasar di wilayah-wilayah terpencil atau kurang berkembang.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan enam lembaga PAUD di Kecamatan Sikur sebagai mitra sasaran utama. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu (1) identifikasi kebutuhan dan asesmen awal, (2) pendampingan

teknis, dan (3) evaluasi serta refleksi program. Tahap pertama diawali dengan observasi dan wawancara untuk memetakan kesiapan lembaga dalam menghadapi proses akreditasi. Tim pelaksana kemudian melakukan kajian dokumen kelembagaan seperti struktur organisasi, rencana kerja, dan instrumen pembelajaran untuk mengetahui kesenjangan dengan standar akreditasi. Hasil pemetaan dijadikan dasar dalam menyusun materi pelatihan dan strategi pendampingan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing lembaga (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Tahap kedua berfokus pada pendampingan teknis yang mencakup pelatihan penyusunan dokumen sesuai delapan standar nasional PAUD, asistensi pengisian Sispena 3.1, dan bimbingan manajemen mutu berbasis akreditasi. Pelaksanaan dilakukan secara kombinasi antara tatap muka dan pendampingan daring (hybrid), menyesuaikan dengan situasi geografis dan kapasitas teknologi lembaga mitra. Sesi pelatihan dirancang dengan pendekatan andragogi, memfasilitasi pengalaman langsung dan partisipasi aktif dari pengelola dan pendidik (Knowles, Holton, & Swanson, 2012). Pada tahap akhir, evaluasi dilakukan melalui angket kepuasan, refleksi kelompok, dan reviu dokumen hasil pendampingan untuk mengukur tingkat kesiapan dan perbaikan kelembagaan. Kegiatan ini diharapkan membangun kapasitas internal lembaga dalam tata kelola berkelanjutan dan mendorong tercapainya akreditasi yang berkualitas (Suyadi & Ulfatin, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kesiapan Awal Lembaga PAUD terhadap Akreditasi

Hasil pemetaan awal terhadap delapan lembaga PAUD mitra di Kecamatan Sikur menunjukkan bahwa kesiapan mereka dalam menghadapi akreditasi masih tergolong rendah. Kondisi ini ditunjukkan oleh belum tersusunnya dokumen-dokumen penting seperti Rencana Kerja Tahunan, laporan evaluasi diri, dan perangkat pendukung pembelajaran yang mengacu pada delapan Standar Nasional PAUD (BAN PAUD dan PNF, 2021). Sebagian besar lembaga hanya memiliki dokumen operasional dasar seperti daftar hadir peserta didik, kurikulum mingguan, dan jadwal harian. Dokumen tersebut belum terintegrasi dalam kerangka manajemen mutu yang berkelanjutan, sebagaimana disyaratkan dalam proses akreditasi.

Selain lemahnya aspek administrasi, wawancara dengan kepala satuan dan guru menunjukkan bahwa pemahaman terhadap standar akreditasi pun masih terbatas. Banyak dari mereka belum pernah membaca instrumen penilaian terbaru dari BAN PAUD dan PNF, dan hanya mengandalkan pengalaman pribadi dalam menyusun kegiatan lembaga (Hartati, 2020). Bahkan, beberapa lembaga tidak memiliki struktur organisasi formal, dan pembagian tugas masih dilakukan secara lisan tanpa didokumentasikan. Situasi ini memperlihatkan bahwa kebutuhan akan pelatihan dan pendampingan sangat mendesak untuk membekali lembaga dalam memahami substansi akreditasi secara menyeluruh.

Standar yang paling banyak diabaikan oleh lembaga mitra adalah standar pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian hasil belajar. Pada umumnya, kepala satuan belum menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan lembaga secara tertulis dan belum memiliki sistem yang memadai untuk menilai perkembangan anak secara objektif. Beberapa guru mengaku hanya melakukan penilaian secara informal dan tidak memiliki portofolio peserta didik yang bisa dijadikan bukti capaian pembelajaran. Hal ini tentu berdampak pada rendahnya akuntabilitas lembaga dan menjadi hambatan utama dalam proses akreditasi.

Temuan ini selaras dengan hasil studi sebelumnya yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan akreditasi yang dirancang secara nasional dengan kesiapan implementasi di tingkat satuan pendidikan, khususnya di daerah. Minimnya akses terhadap pelatihan, rendahnya literasi kelembagaan, serta keterbatasan sumber daya manusia menjadi penyebab utama terhambatnya proses akreditasi pada lembaga PAUD (Rahmawati & Suryana 2019). Oleh karena itu, pendampingan terstruktur menjadi solusi strategis yang mampu menjembatani kesenjangan tersebut dengan pendekatan yang kontekstual dan berkelanjutan.

Dengan memahami kelemahan dan tantangan yang dihadapi lembaga, tim pelaksana merancang program pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Strategi ini bertujuan untuk memperbaiki kelembagaan secara bertahap, mulai dari penguatan pemahaman terhadap standar, penyusunan dokumen, hingga praktik pengelolaan berbasis mutu (Musthafa, 2011). Asesmen awal ini menjadi fondasi yang penting dalam menyusun langkah intervensi yang efektif dan berkelanjutan.

Selain lemahnya aspek dokumentasi, sebagian besar lembaga PAUD mitra juga belum memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang jelas terhadap pelaksanaan program pembelajaran. Evaluasi kegiatan masih bersifat informal dan tidak tercatat secara tertib. Ketiadaan laporan evaluasi kegiatan menyebabkan pihak lembaga kesulitan dalam mengukur keberhasilan program serta dalam menyusun perbaikan

berkelanjutan. Hal ini tentu berdampak langsung pada rendahnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan program di satuan pendidikan anak usia dini (Kemdikbud, 2018).

Beberapa kepala satuan mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama penghambat proses akreditasi. Sebagian besar pengelola lembaga bukan berlatar belakang manajemen pendidikan, sehingga tidak familiar dengan istilah dan alur akreditasi. Hal ini menyebabkan proses penyusunan dokumen dilakukan secara sporadis dan tanpa kerangka standar. Selain itu, beban kerja ganda yang ditanggung guru, yang juga merangkap sebagai pengelola, menjadikan penataan dokumen kelembagaan terabaikan.

Dari segi fasilitas pendukung, sebagian besar lembaga belum memiliki sarana penyimpanan dokumen yang aman dan terorganisir. Dokumen penting masih disimpan dalam bentuk cetak tanpa pengarsipan digital, sehingga rentan hilang atau rusak. Ketika dilakukan penelusuran dokumen selama asesmen awal, beberapa lembaga mengalami kesulitan dalam menunjukkan data yang relevan. Ketiadaan sistem penyimpanan data ini menambah kompleksitas masalah dan menjadi penghambat dalam proses pengisian Sispena secara daring.

Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa kebutuhan lembaga PAUD bukan hanya pada penyusunan dokumen untuk kepentingan akreditasi, tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan secara menyeluruh. Dibutuhkan strategi intervensi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga edukatif dan transformatif, sehingga mampu membangun pemahaman, kesadaran, dan komitmen bersama terhadap pentingnya manajemen mutu. Oleh sebab itu, pendekatan pendampingan yang menyentuh aspek substansi dan struktur menjadi sangat relevan untuk diterapkan di Kecamatan Sikur.

### **Peningkatan Kapasitas Melalui Pendampingan Terstruktur**

Pendampingan teknis terhadap lembaga mitra dilakukan melalui serangkaian kegiatan pelatihan, asistensi penyusunan dokumen, dan konsultasi intensif. Proses ini dilaksanakan secara bertahap selama kurang lebih tiga bulan dengan pertemuan terjadwal dan materi yang disusun berdasarkan kelemahan masing-masing lembaga. Metode yang digunakan bersifat partisipatif dan kontekstual agar peserta dapat belajar dari pengalaman dan tantangan nyata di lapangan. Setiap sesi diarahkan untuk membangun pemahaman konseptual sekaligus keterampilan praktis dalam menyiapkan instrumen akreditasi.

Materi pelatihan mencakup seluruh komponen penting dalam standar nasional PAUD, seperti standar isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta penilaian hasil belajar (Kemdikbud, 2018). Peserta dibimbing menyusun dokumen dasar seperti struktur organisasi, program kerja tahunan, visi-misi lembaga, dan laporan kegiatan. Tim pelaksana menyediakan modul yang disederhanakan dan format dokumen yang siap disesuaikan agar memudahkan proses penyesuaian bagi lembaga mitra yang sebelumnya belum terbiasa dengan format resmi akreditasi.

Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada aspek penguasaan materi dan kemandirian dalam penyusunan dokumen. Lima dari enam lembaga mitra berhasil menyusun dokumen pokok dan sebagian dokumen pendukung secara mandiri, dengan tingkat kesesuaian yang cukup tinggi berdasarkan panduan BAN PAUD dan PNF. Kepala satuan dan guru mulai memahami fungsi masing-masing dokumen, keterkaitannya dengan manajemen mutu, serta mekanisme penyimpanan dan pengarsipan yang sistematis. Ini menunjukkan bahwa pelatihan yang dilakukan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif.

Transformasi kelembagaan juga terlihat dari pembentukan tim mutu internal di beberapa lembaga. Tim ini bertugas mengawal proses penyusunan dokumen, mengevaluasi keterlaksanaan standar mutu, serta mengembangkan budaya refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Beberapa lembaga bahkan mulai menetapkan jadwal evaluasi bulanan dan pelaporan kegiatan secara berkala kepada yayasan atau Dinas Pendidikan setempat. Perubahan ini menunjukkan bahwa lembaga mulai menerapkan prinsip manajemen berbasis data dan sistem kontrol mutu internal.

Selain aspek teknis, pendampingan juga mendorong terjadinya perubahan sikap di kalangan pengelola. Sebelumnya, penyusunan dokumen sering dipandang sebagai beban administratif, namun setelah melalui proses pelatihan, peserta mulai memahami nilai strategis dokumen dalam menjamin keberlangsungan layanan pendidikan yang berkualitas. Mereka mulai menyusun rencana kerja berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, menetapkan indikator keberhasilan, dan mendokumentasikan keterlibatan orang tua dan masyarakat sebagai bagian dari penguatan tata kelola yang transparan.

Suasana kegiatan pelatihan dapat dilihat dalam Gambar 1, yang memperlihatkan keterlibatan aktif peserta dalam diskusi kelompok dan simulasi penyusunan dokumen. Pelatihan berlangsung dalam suasana kondusif, kolaboratif, dan penuh antusiasme. Interaksi antarpeserta dari berbagai lembaga menciptakan

ruang berbagi pengalaman dan pertukaran praktik baik yang memperkaya pemahaman mereka terhadap konsep akreditasi.



**Gambar 1:** Pendampingan Akreditasi bersama Asesor di UPT Dikbud Kec. Sikur

Partisipasi aktif dalam pelatihan juga memperkuat rasa percaya diri peserta dalam menghadapi proses akreditasi yang sebelumnya dianggap rumit dan menakutkan. Mereka mulai menempatkan akreditasi sebagai proses evaluasi kelembagaan yang membangun, bukan sekadar formalitas administratif. Sikap positif ini menjadi modal sosial yang penting dalam mendorong komitmen keberlanjutan mutu pendidikan di tingkat satuan. Beberapa lembaga bahkan mulai mengembangkan inovasi kelembagaan sederhana, seperti penggunaan folder digital untuk menyimpan dokumen, pelaporan kegiatan melalui Google Form, dan penjadwalan rapat mutu internal. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan mendorong tidak hanya kepatuhan terhadap standar, tetapi juga kreativitas dalam merespons tuntutan mutu pendidikan dengan pendekatan yang adaptif.

Secara keseluruhan, pendampingan terstruktur yang dilaksanakan dalam kegiatan ini terbukti mampu mendorong terjadinya perubahan signifikan pada aspek kelembagaan, manajerial, dan budaya kerja di lembaga mitra. Intervensi ini tidak hanya membantu dalam penyusunan dokumen akreditasi, tetapi juga menjadi titik awal bagi transformasi tata kelola PAUD berbasis mutu dan berkelanjutan.

### **Penguatan Literasi Digital dan Simulasi Sispena**

Akreditasi PAUD di Indonesia saat ini dilaksanakan secara digital melalui Sistem Penilaian Akreditasi atau Sispena 3.1. Platform ini menjadi instrumen utama yang digunakan oleh lembaga untuk mengunggah dokumen, menjawab indikator penilaian, serta menyampaikan bukti pendukung secara daring. Namun, temuan awal kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga PAUD mitra belum memahami tata cara penggunaan platform ini. Hanya satu dari enam lembaga yang telah memiliki akun aktif dan mengetahui alur pengisian Sispena.

Ketidaktahuan terhadap sistem ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya literasi digital pengelola lembaga, terbatasnya pelatihan daring yang diterima sebelumnya, serta minimnya pendampingan teknis dari pihak terkait. Beberapa kepala satuan dan guru bahkan belum pernah mendengar istilah Sispena, dan menganggap bahwa proses akreditasi masih dilakukan secara manual. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang serius antara sistem digital yang diterapkan pemerintah dan kesiapan lembaga di tingkat akar rumput.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kegiatan pendampingan ini menyediakan sesi pelatihan khusus tentang penggunaan Sispena. Pelatihan dilakukan secara praktik langsung, di mana peserta diminta membawa laptop atau menggunakan fasilitas perangkat yang disediakan oleh tim pelaksana. Sesi dimulai dengan registrasi akun lembaga, kemudian dilanjutkan dengan navigasi menu, pengisian profil, dan pengunggahan dokumen sesuai dengan indikator dalam sistem. Metode simulasi menjadi strategi utama dalam pelatihan agar peserta dapat langsung mengalami proses yang sesungguhnya.

Respons peserta terhadap pelatihan Sispena sangat positif. Mereka mengaku merasa lebih percaya diri karena akhirnya memahami alur digital yang sebelumnya membingungkan. Peserta juga mulai menyusun daftar dokumen yang akan diunggah dan memeriksa kelengkapan masing-masing indikator. Dalam beberapa sesi, peserta juga saling membantu dalam proses unggah dokumen dan memberikan saran tentang pengemasan file yang sesuai. Kolaborasi ini mendorong munculnya semangat belajar bersama di antara lembaga mitra.

Setelah tiga kali pelatihan intensif, seluruh lembaga berhasil mengakses akun Sispena masing-masing dan mengisi sebagian besar indikator dengan benar. Meskipun belum sempurna, capaian ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam literasi digital peserta. Peserta juga mulai memahami bahwa sistem daring bukanlah hambatan, tetapi justru peluang untuk mempercepat proses evaluasi dan mempermudah komunikasi dengan asesor BAN PAUD dan PNF. Proses digitalisasi direspon secara adaptif dan diterima sebagai bagian dari peningkatan mutu lembaga.

Dalam pelatihan, peserta juga dikenalkan dengan berbagai teknik dasar literasi digital, seperti konversi file ke format PDF, pengompresan ukuran file, dan penamaan dokumen secara sistematis. Hal-hal teknis ini sebelumnya sering menjadi kendala, karena peserta tidak memiliki keterampilan dasar TIK. Melalui pendampingan ini, peserta akhirnya dapat menyusun dan mengarsipkan dokumen digital mereka dengan lebih rapi, terorganisir, dan sesuai standar yang dibutuhkan.

Selain keterampilan teknis, pendampingan juga mendorong perubahan sikap terhadap penggunaan teknologi dalam manajemen lembaga. Sebagian besar peserta menyatakan niat untuk mulai mendokumentasikan kegiatan lembaga dalam format digital secara berkala. Beberapa lembaga bahkan telah mulai memindai dokumen cetak dan menyimpannya dalam Google Drive, serta berencana menggunakan email resmi lembaga untuk komunikasi formal. Ini merupakan indikator bahwa kegiatan pendampingan mampu menanamkan kesadaran pentingnya transformasi digital di lingkungan PAUD.

Kemampuan untuk mengakses dan mengelola data secara daring juga membuka peluang bagi lembaga untuk mengikuti berbagai program pemerintah yang kini berbasis digital, seperti Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan sistem pelaporan BOS online. Peserta menjadi lebih terbuka terhadap teknologi sebagai alat bantu kerja dan pengelolaan informasi yang efisien. Transformasi ini merupakan langkah awal menuju tata kelola PAUD yang modern dan adaptif terhadap kebijakan pendidikan nasional.

Secara keseluruhan, pendampingan literasi digital melalui pelatihan Sispena berhasil menjembatani kesenjangan antara kebijakan akreditasi berbasis daring dan kesiapan teknis lembaga. Intervensi ini membuktikan bahwa pelatihan berbasis praktik langsung, dengan pendekatan andragogi dan berorientasi pada kebutuhan nyata peserta, dapat meningkatkan kapasitas digital secara signifikan. Dengan meningkatnya literasi digital ini, lembaga PAUD mitra lebih siap menghadapi akreditasi serta membangun sistem kelembagaan yang transparan, terdokumentasi, dan akuntabel.

### **Efek Sosial dan Kolaborasi Antar-Lembaga PAUD**

Salah satu dampak tidak langsung namun signifikan dari kegiatan pendampingan ini adalah munculnya efek sosial positif di antara lembaga PAUD mitra. Kegiatan pelatihan yang dilakukan secara kolektif mempertemukan para kepala satuan dan guru dari berbagai lembaga dalam forum yang sama. Forum ini kemudian menjadi ruang interaksi baru yang tidak hanya membahas teknis akreditasi, tetapi juga berbagi pengalaman, strategi manajerial, serta solusi atas kendala yang dihadapi masing-masing lembaga.

Diskusi antarlembaga secara alami menumbuhkan ikatan sosial dan emosional yang memperkuat rasa kebersamaan. Beberapa peserta menyampaikan bahwa sebelum kegiatan ini mereka jarang saling berkomunikasi atau berkoordinasi, meskipun berada dalam satu kecamatan. Pendampingan ini membuka ruang kolaborasi yang sebelumnya tidak terbangun, serta menciptakan atmosfer saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan mutu PAUD melalui akreditasi.

Efek sosial lainnya terlihat dari terbentuknya jaringan informal antar kepala satuan PAUD. Setelah kegiatan pelatihan, para peserta berinisiatif untuk membentuk grup komunikasi daring sebagai media pertukaran informasi, konsultasi teknis, serta berbagi sumber daya dan dokumen. Grup ini menjadi sarana koordinasi lintas-lembaga yang efektif dan mempercepat proses penyesuaian kebijakan internal berdasarkan masukan rekan sejawat.

Forum komunikasi ini juga menjadi ajang berbagi praktik baik dalam pengelolaan lembaga. Salah satu lembaga mitra, misalnya, membagikan template dokumen manajemen dan strategi pelibatan orang tua yang kemudian diadopsi oleh lembaga lain. Tindakan ini mempercepat proses penyusunan dokumen di lembaga yang belum memiliki sumber daya administrasi memadai. Dengan demikian, kolaborasi tidak hanya memperkuat jejaring sosial, tetapi juga mempercepat pencapaian tujuan teknis akreditasi.

Selain pertukaran informasi dan dokumen, forum ini juga mendorong inisiatif untuk menyelenggarakan pelatihan lanjutan secara swadaya. Para kepala satuan menyatakan bahwa forum ini sangat potensial untuk berkembang menjadi wadah pelatihan berkelanjutan. Beberapa peserta bahkan mengusulkan untuk menghadirkan narasumber dari luar daerah agar dapat memperluas wawasan manajerial

dan pedagogis. Hal ini menunjukkan bahwa forum tersebut telah tumbuh menjadi komunitas belajar profesional yang bersifat mandiri.

Kolaborasi antar-lembaga ini juga membawa dampak pada peningkatan motivasi dan rasa percaya diri para kepala satuan. Melalui proses pendampingan dan interaksi lintas-lembaga, mereka menyadari bahwa tantangan yang dihadapi bersifat umum dan dapat diatasi secara bersama-sama. Mereka menjadi lebih terbuka terhadap saran dan kritik, serta mulai memandang akreditasi sebagai upaya kolektif, bukan semata tanggung jawab individu di dalam lembaga.

Dalam beberapa pertemuan, para kepala satuan bahkan mendiskusikan potensi pembentukan forum PAUD tingkat kecamatan secara resmi. Tujuan forum ini adalah untuk mendorong penyusunan program kerja bersama, memperjuangkan kebutuhan lembaga kepada dinas pendidikan, serta menyelenggarakan evaluasi bersama secara berkala. Wacana ini memperkuat kesadaran akan pentingnya organisasi profesi yang mampu mengadvokasi kebutuhan PAUD secara kolektif.

Efek sosial lainnya adalah meningkatnya kesadaran tentang pentingnya berbagi sumber daya. Sebelum kegiatan ini, lembaga cenderung bekerja secara terpisah dan individualistik. Namun, setelah pendampingan, muncul keinginan untuk saling berbagi fasilitas seperti alat peraga, modul pelatihan, dan media pembelajaran. Kolaborasi ini menjadi fondasi bagi terbentuknya solidaritas pendidikan anak usia dini berbasis komunitas.

Dengan terbangunnya jejaring sosial dan kolaborasi yang kuat, lembaga-lembaga PAUD mitra kini tidak lagi berjalan sendiri dalam menghadapi tantangan akreditasi. Mereka memiliki ruang berbagi, belajar, dan saling mendukung dalam memperbaiki kualitas pendidikan. Ini menjadi indikasi bahwa pendampingan tidak hanya menghasilkan perubahan teknis, tetapi juga membangun iklim sosial yang kondusif bagi peningkatan mutu PAUD secara berkelanjutan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini membuktikan bahwa pendampingan yang terstruktur, kontekstual, dan berbasis kebutuhan nyata mampu meningkatkan kesiapan lembaga PAUD dalam menghadapi proses akreditasi. Temuan asesmen awal menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga mitra belum memiliki kelengkapan dokumen kelembagaan sesuai standar dan belum memahami secara utuh delapan indikator akreditasi. Namun, melalui pelatihan, asistensi teknis, serta simulasi pengisian Sispena 3.1, terjadi kemajuan signifikan dalam aspek dokumentasi, pemahaman manajemen mutu, serta penguasaan literasi digital.

Lebih dari sekadar peningkatan administratif, kegiatan ini juga memicu perubahan budaya kerja yang lebih tertib, sistematis, dan partisipatif. Para peserta menjadi lebih sadar akan pentingnya manajemen mutu berkelanjutan dan mulai membangun tim mutu internal sebagai bagian dari praktik kelembagaan yang reflektif dan kolaboratif. Terbentuknya jejaring komunikasi antar-lembaga PAUD menjadi nilai tambah penting dalam membangun ekosistem pendidikan anak usia dini yang adaptif dan saling mendukung.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa intervensi berbasis komunitas yang dirancang secara partisipatif mampu menjadi solusi strategis dalam menutup kesenjangan mutu lembaga PAUD, khususnya di daerah. Model pendampingan ini relevan untuk direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik serupa sebagai bentuk kontribusi pendidikan tinggi terhadap percepatan pemerataan mutu pendidikan anak usia dini. Untuk memperkuat dampak dan keberlanjutan program, disarankan agar pemerintah daerah menyediakan dukungan kebijakan yang memungkinkan pelatihan berkelanjutan, insentif pengembangan SDM, serta sistem monitoring terpadu bagi lembaga PAUD. Lembaga mitra diharapkan terus membangun budaya mutu internal secara konsisten melalui tim pengembang mutu, evaluasi rutin pasca-akreditasi, dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Sementara itu, lembaga pendidikan tinggi perlu memperluas jangkauan pendampingan dan menyinergikan program PkM dengan arah kebijakan lokal demi terciptanya dampak yang berkelanjutan dan sistemik.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami ucapkan kepada Universitas Hamzanwadi atas dukungan finansial yang diberikan melalui skema Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, para kepala satuan PAUD, serta seluruh mitra lembaga di Kecamatan Sikur yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF. (2021). *Instrumen Akreditasi PAUD (IA PAUD) Versi 3.1*. Jakarta: BAN PAUD dan PNF.
- BAN PAUD dan PNF. (2020). *Petunjuk pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF tahun 2020*. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
- Hartati, S. (2020). Tantangan Implementasi Standar Nasional PAUD di Daerah. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 14(2), 123–134. <https://doi.org/10.xxxx/jpaud.2020.14.2.123>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang akreditasi PAUD dan pendidikan nonformal*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/154362/permen-kemdikbud-no-13-tahun-2020>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Akreditasi PAUD dan Pendidikan Nonformal*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2024). *Data Referensi PAUD Kecamatan Sikur*. Retrieved from <https://referensi.data.kemdikbud.go.id>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2025). *Data induk satuan pendidikan Kecamatan Sikur per 17 Juni 2025*. <https://dapo.kemdikbud.go.id/>
- Knowles, M. S. (1984). *The Adult Learner: A Neglected Species* (3rd ed.). Houston, TX: Gulf Publishing.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Musthafa, B. (2011). *Pendidikan Anak Usia Dini: Konsep dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahmawati, D., & Suryana, D. (2019). Penguatan Kapasitas Lembaga PAUD Menuju Mutu Pendidikan Berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 22–30.
- Suyadi, & Ulfatin, N. (2017). *Manajemen mutu layanan pendidikan anak usia dini*. Prenadamedia Group.
- UNESCO. (2010). *Early Childhood Care and Education Regional Report: Asia-Pacific*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- UNESCO. (2015). *Education for all 2000–2015: Achievements and challenges*. UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232205>
- Knowles, M. S., Holton, E. F., & Swanson, R. A. (2012). *The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development* (7th ed.). Routledge.
- UNESCO. (2022). *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education*. Paris: UNESCO Publishing.